BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu di bangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangung. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794 – 1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willern Daendels (1808 – 1811).

Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung tumur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai di bangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.

Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian pindah lagi ke kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan gedung pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti berapa lama kota Bandung dibangun. Akan tetapi kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain Bupati R.A Wiranatakuksumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Pemerintah Kota Bandung bertempat di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung dan kedudukannya sebagai Instansi pemerintahan.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Pemerintah Kota Bandung merupakan instansi pemerintahan berdasarkan UU N0. 32/2004 dan PP N0. 41/2007 (jo PERMENDAGRI N0. 57/2007).

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Pemerintah Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan Kota Bandung berdasarkan UU dan PERMENDAGRI. Didalamnya terdapat divisi-divisi yang mempunyai tugas dan fungsi yang telah di tetapkan oleh peraturan daerah. Kewenangan Pemerintah Kota Bandung meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan seluruh aspek kehidupan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi / departement tempat kerja praktek

Bidang pekerjaann divisi / departement tempat kerja praktek yaitu bergerak dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, yang berfungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi

2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informasi yang meliputi hubungan masyarakat, pemberdayaan potensi Informasi, media Informasi, serta promosi dan informasi.

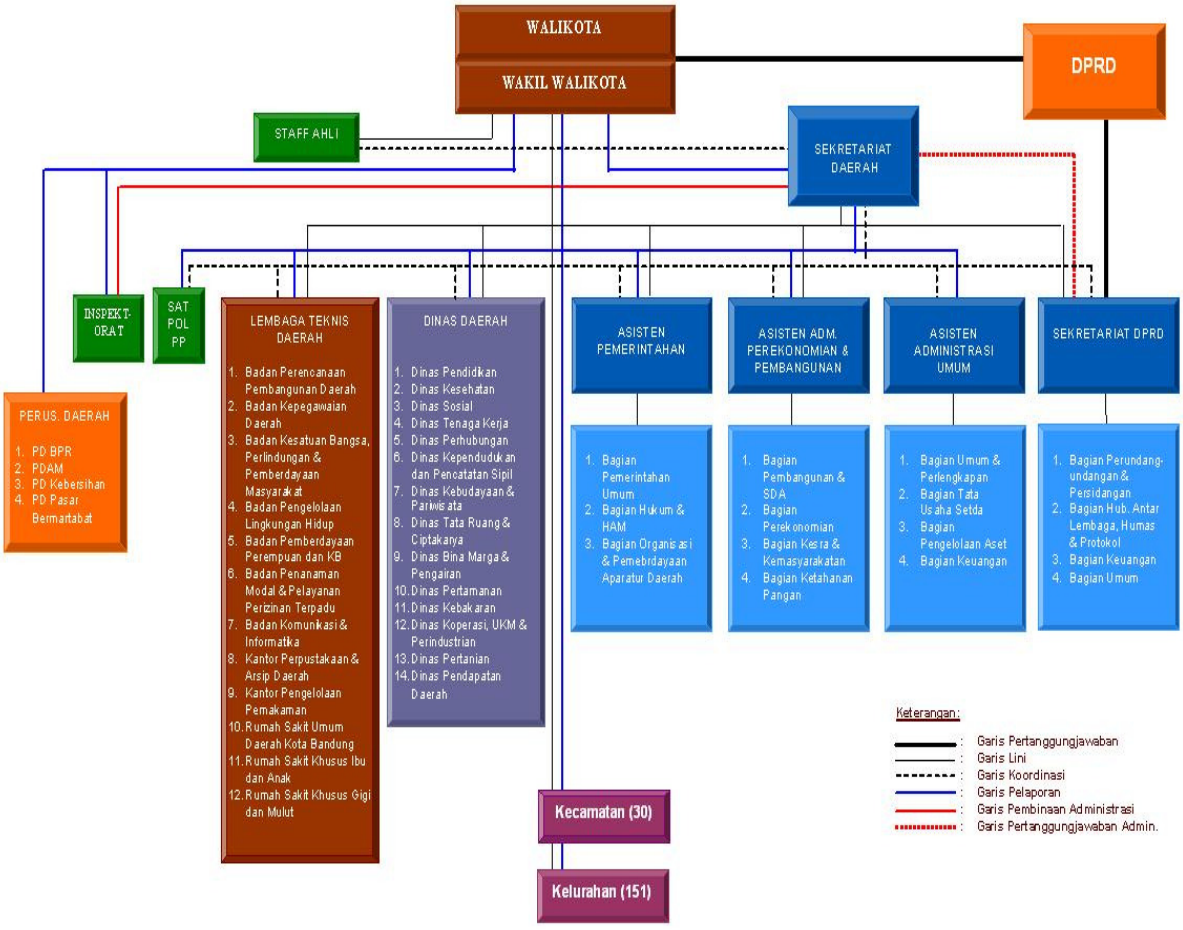
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi : administrasi umum dan kepagawaian, administrasi perencanaan dan evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Badan Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagai Badan yang merupakan penggabungan Dinas Informasi dan Komunikasi, Kantor Pelayanan Data Elektronik dan Subdin Postel pada Dinas Perhubungan adalah:

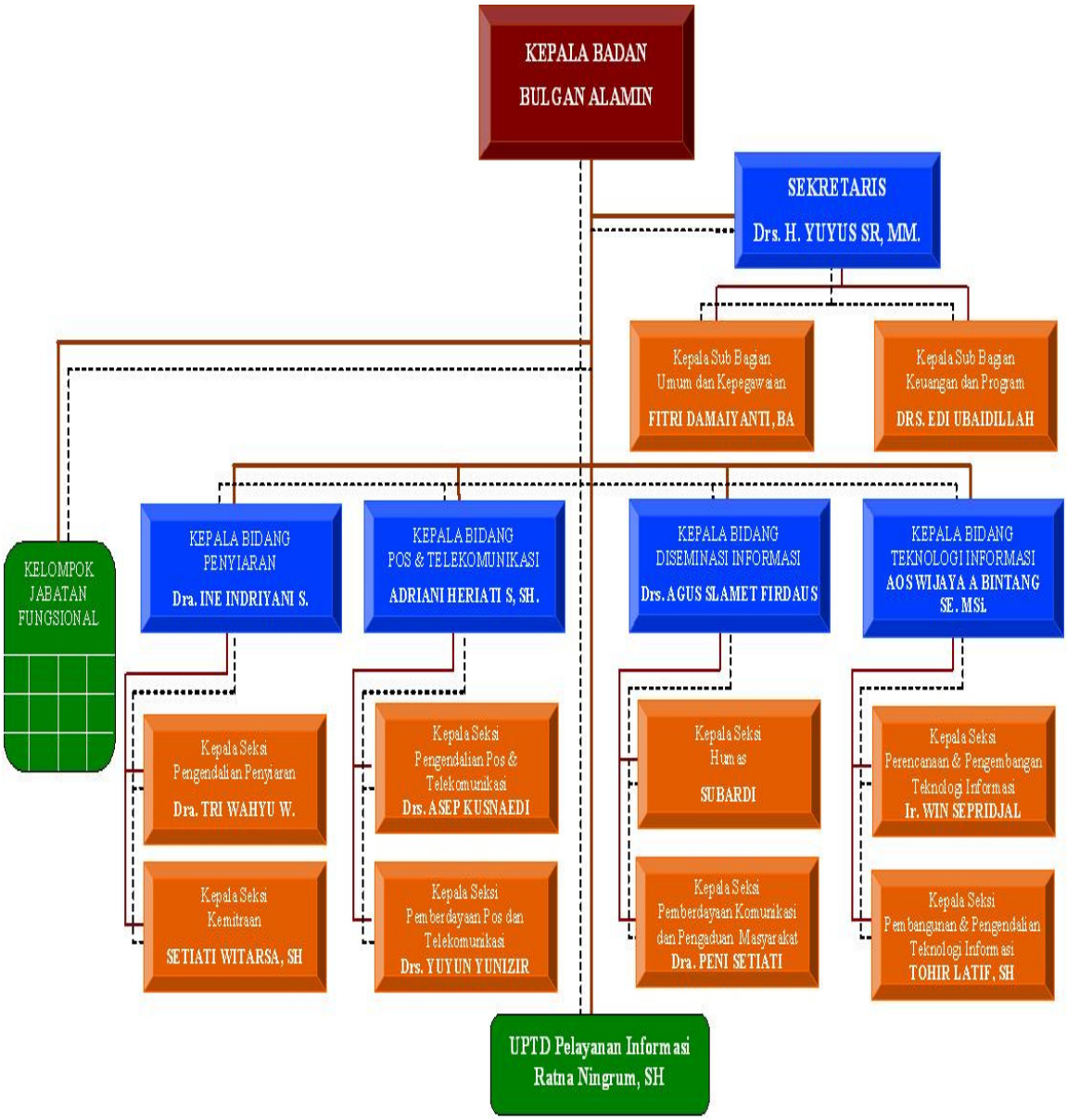
1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
3. Peraturan Daerah No. 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas daerah kota Bandung.

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu landasan organisasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan.



Gambar 2.1. Struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung



Gambar 2.2. Struktur organisasi Badan Komunikasi dan Informatika

Keterangan:

a. Kepala Badan

b. Sekretaris bertugas meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan dan program.

Sekretaris terdiri dari:

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan dan Program

c. Bidang penyiaran

Penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah melainkan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepentingan masyarakat.

Bidang penyiaran terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Penyiaran
2. Seksi Kemitraan

d. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagai penggabungan dari Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pada bidang pos dan telekomunikasi serta pengendalian pos dan telekomunikasi serta pemberdayaan pos dan telekomunikasi mempunyai tugas pembinaan dan pendataan terhadap pengusaha penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi.

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Pos dan Telekomunikasi
2. Seksi Pemberdayaan Pos dan telekomunikasi

e. Bidang Desiminasi Informasi terdiri dari:

1. Seksi Hubungan Masyarakat
2. Seksi Pemberdayaan Komunikasi dan Pengaduan Publik

f. Bidang Teknologi Informasi

Teknologi Informasi bertujuan mempercepat akses komunikasi dari aparat kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada aparat, dan ini ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi dan komunikasi dalam pemerintah yaitu keterbukaan yang di tunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bidang Teknologi informasi terdiri dari:

1. Seksi perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Seksi Pembangunan dan Pengendalian Teknologi Informasi.